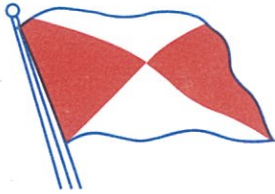


PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020



PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

Jl. Kalibesar Timur No. 10 - 12, JAKARTA 11110, Indonesia

Telephone : +62 21 6912547 - 49

Telefax : +62 21 6901450, 6902726

Website : <http://www.bahteradhiguna.co.id>

E-mail : pelba@bahteradhiguna.co.id

INSA : 227/INSA/VII/1990

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Kami, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : RULY FIRMANSYAH
Alamat kantor : PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
Jl. Kalibesar Timur No. 10-12
Jakarta Barat
Alamat domisili sesuai KTP atau : Jl. Legoso Raya No. 66 RT.003 RW.001
kartu identitas lain : Ciputat Timur – Tangerang Selatan
Nomor telepon : (021) 6912547
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
2. Nama : S. OBRIEN KRISMAWANTO
Alamat kantor : PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
Jl. Kalibesar Timur No. 10-12
Jakarta Barat
Alamat domisili sesuai KTP atau : Villa Serpong Blok D 5/3, RT.064 RW.010 Kel. Jelupang
kartu identitas lain : Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
Nomor telepon : (021) 6912547
Jabatan : DIREKTUR KEUANGAN

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili susunan pengurus PT Pelayaran Bahtera Adhiguna:

Jakarta, 25 Juni 2021



Ruly Firmansyah
Direktur Utama

S. Obrien Krismawanto
Direktur Keuangan



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

JAKARTA
25 Juni 2021

Daniel Kohar, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.1130

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

01153/2.1025/AU.1/01/1130-1/1/VI/2021

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019*)</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	5	109.187	186.802
Piutang usaha	6	774.761	561.339
Piutang lain-lain	7	49.631	44.437
Persediaan		33.079	21.514
Pajak dibayar dimuka	19	6.176	-
Biaya dibayar dimuka dan uang muka		5.319	23.157
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya		1.411	-
Piutang sewa pembiayaan, bagian lancar	8	14.132	-
Jumlah aset lancar		993.696	837.249
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	9	955.868	851.460
Aset hak-guna		728	-
Investasi pada entitas asosiasi	10	41.171	37.164
Pajak dibayar dimuka	19	35.814	35.035
Piutang sewa pembiayaan, bagian tidak lancar	8	208.451	-
Jumlah aset tidak lancar		1.242.032	923.659
JUMLAH ASET		2.235.728	1.760.908

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 24

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019*)</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	11	564.467	393.727
Utang pajak	19	28.697	22.404
Utang lain-lain		11.748	10.083
Biaya yang masih harus dibayar	12	45.468	17.703
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	13	142.656	138.625
Liabilitas sewa	14	82.797	-
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek		<u>107</u>	<u>-</u>
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>875.940</u>	<u>582.542</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	13	410.570	553.226
Liabilitas imbalan kerja		3.683	5.191
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	14	<u>129.330</u>	<u>-</u>
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>543.583</u>	<u>558.417</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>1.419.523</u>	<u>1.140.959</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar - 86.696 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 21.675 saham	15	21.675	21.675
Tambahan modal disetor	16	33.406	33.406
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya		2.875	2.875
Belum ditentukan penggunaannya		<u>758.249</u>	<u>561.993</u>
Jumlah ekuitas		<u>816.205</u>	<u>619.949</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>2.235.728</u>	<u>1.760.908</u>

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 24

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN USAHA	17	1.966.430	1.627.804
BEBAN POKOK PENDAPATAN	18	<u>(1.703.806)</u>	<u>(1.418.402)</u>
LABA BRUTO		262.624	209.402
Beban umum dan administrasi	18	(44.408)	(39.780)
Beban bunga		(81.451)	(50.648)
Penghasilan bunga		62.587	1.182
(Beban)/penghasilan lain-lain, bersih		<u>(1.951)</u>	<u>7.939</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		197.401	128.095
Beban pajak penghasilan	19	<u>(1.969)</u>	<u>(840)</u>
LABA TAHUN BERJALAN		<u>195.432</u>	<u>127.255</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN			
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		(75)	(88)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas program imbalan kerja		<u>899</u>	<u>(136)</u>
JUMLAH PENGHASILAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		<u>824</u>	<u>(224)</u>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>196.256</u>	<u>127.031</u>

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Saldo laba				Jumlah ekuitas
	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 31 Desember 2018	21.675	33.406	2.875	434.962	492.918
Laba tahun berjalan	-	-	-	127.255	127.255
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	(88)	(88)
Pengukuran kembali atas program imbalan kerja	-	-	-	(136)	(136)
Saldo 31 Desember 2019	21.675	33.406	2.875	561.993	619.949
Laba tahun berjalan	-	-	-	195.432	195.432
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	(75)	(75)
Pengukuran kembali atas program imbalan kerja	-	-	-	899	899
Saldo 31 Desember 2020	21.675	33.406	2.875	758.249	816.205

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba sebelum pajak penghasilan	197.401	128.095
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan aset tetap dan aset hak-guna	118.678	98.170
Beban bunga	81.451	50.648
Imbalan kerja	(237)	1.303
Bagian laba entitas asosiasi	(8.137)	(9.053)
Penghasilan bunga	<u>(62.587)</u>	<u>(1.182)</u>
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	<u>326.569</u>	<u>267.981</u>
Perubahan modal kerja:		
Piutang usaha	(213.422)	(98.494)
Piutang lain-lain	(1.139)	(4.898)
Persediaan	(11.565)	(3.858)
Pajak dibayar dimuka	(6.955)	(30.943)
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	17.838	(2.114)
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	(1.411)	-
Utang usaha	170.740	18.334
Utang pajak	5.582	17.428
Utang lain-lain	1.665	(7.323)
Biaya yang masih harus dibayar	<u>23.057</u>	<u>4.126</u>
Arus kas operasi sesudah perubahan modal kerja	310.959	160.239
Pembayaran pajak penghasilan	(1.258)	(1.579)
Pembayaran imbalan kerja	(265)	-
Penerimaan bunga	62.587	1.182
Penerimaan piutang sewa pembiayaan	27.671	-
Pembayaran bunga	<u>(76.743)</u>	<u>(52.447)</u>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>322.951</u>	<u>107.395</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	<u>(222.544)</u>	<u>(171.486)</u>
Kas bersih digunakan untuk dari aktivitas investasi	<u>(222.544)</u>	<u>(171.486)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran pinjaman kepada pemegang saham	(138.625)	(119.042)
Pembayaran liabilitas sewa	(39.397)	-
Perolehan pinjaman kepada pemegang saham	<u>-</u>	<u>290.047</u>
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>(178.022)</u>	<u>171.005</u>
(PENURUNAN)/ KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	<u>(77.615)</u>	<u>106.914</u>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>186.802</u>	<u>79.887</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>109.187</u>	<u>186.802</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM**a. Pendirian dan informasi umum**

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("Perusahaan") adalah perusahaan milik negara yang didirikan pada tahun 1961 dengan nama Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara dan merupakan kelanjutan usaha dari perusahaan maritim milik Belanda, N.V. Nederland Indonesie Steenkolen Handel Maatschap-pij ("NISHM") Tanjung Priok yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah"). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1971, nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Negara Bahtera Adhiguna. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1971. Berdasarkan akta No.34 tanggal 30 Desember 1971 dari Soeleman Ardjasmita, S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No.J.A.5/63/23 tanggal 11 Agustus 1972, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.8 tanggal 26 Januari 1973, Tambahan No.58.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan akta No.19 tanggal 30 Januari 2012 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, tentang perubahan kepemilikan dalam rangka pengalihan modal saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PT PLN (Persero)") dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero). Dengan adanya pengalihan ini, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10-04508 tanggal 9 Februari 2012.

Perusahaan bergerak dalam bidang transportasi bahan tambang serta layanan jasa dermaga. Pengendali akhir Perusahaan adalah PT PLN (Persero).

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Jalan Kalibesar Timur No.10-12, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang penyelenggaraan jasa angkutan laut, terutama di angkutan laut dan usaha-usaha lainnya yang menunjang tercapainya tujuan perkembangan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 35 karyawan tetap dan 8 karyawan tidak tetap (tidak diaudit) dan pada tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 33 karyawan tetap dan 3 karyawan tidak tetap (tidak diaudit).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)
b. Susunan pengurus dan informasi lain

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Komisaris Utama	: Noesita Indriani	Ali Mudin
Komisaris	: Stefanus Sugeng Wardoyo	-
Komisaris	: Poppy Sofia	-
Pelaksana Tugas ("PLT")		
Komisaris	: -	Stefanus Sugeng Wardoyo
PLT Komisaris	: -	Poppy Sofia
Direktur Utama	: Ruly Firmansyah	-
PLT Direktur Utama	: -	Ruly Firmansyah
Direktur Keuangan	: S. Obrien Krismawanto	-
PLT Direktur Keuangan	: -	S. Obrien Krismawanto
PLT Direktur Operasi	: Acto Pambudi RD M.Mar	Acto Pambudi RD M.Mar

Berdasarkan keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris No.23 tanggal 11 Mei 2021 dari Lenny Janis Ishak, S.H., sehubungan dengan perubahan Komisaris, yang mana dengan hormat mengangkat Mimin Insani diangkat sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan dengan hormat Noesita Indriani dari posisi sebelumnya sebagai Komisaris Utama. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0319827 tanggal 21 Mei 2021.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU DAN REVISI, SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")
a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru dan revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

- Penyesuaian tahunan 2020, "Kerangka Konseptual 2019"
- PSAK No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- PSAK No. 102, "Akuntansi Murabahah"
- ISAK No. 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"
- ISAK No. 36, "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK No. 16, Aset Tetap dan PSAK No. 73, Sewa"
- ISAK No. 101, "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK No. 102, "Penurunan Nilai Piutang Murabahah"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan"

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU DAN REVISI, SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") (lanjutan)**a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru dan revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)**

- Amandemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amandemen PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- Amandemen PSAK No. 73, "Konsesi Sewa terkait COVID-19"
- Amandemen PSAK No. 71, Amandemen PSAK No. 55, dan Amandemen PSAK No. 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan ("PPSAK") No. 13 mengenai pencabutan PSAK No. 45, "Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba".

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"
- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual"
- Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Amandemen PSAK No. 71, Amandemen PSAK No. 55, Amandemen PSAK No. 60, Amandemen PSAK No. 62 dan Amandemen PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga 2
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 111, "Akuntansi Wa'd".

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2021, kecuali Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual", Amandemen PSAK No. 57, Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, Penyesuaian tahunan PSAK No. 71 dan Penyesuaian tahunan PSAK No. 73 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, Amandemen PSAK No. 1 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan ini diperkenankan.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan Perusahaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) BARU DAN REVISI, SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) (lanjutan)**b. Penerapan awal PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”**

PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan” diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Perusahaan menerapkan PSAK No. 71 mulai 1 Januari 2020.

Berdasarkan penilaian penurunan nilai, Perusahaan tidak mencatat adanya dampak signifikan atas penyisihan penurunan nilai piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang sewa pembiayaan, sehingga Perusahaan tidak membukukan penyesuaian pada saldo laba ditahan awal tahun 2020.

c. Penerapan awal PSAK No. 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”

PSAK No. 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”, diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2020, yang berdampak pada perubahan atas kebijakan akuntansi dan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap jumlah yang telah diakui pada laporan keuangan.

Standar baru menentukan pengakuan pendapatan yaitu terjadi ketika pengendalian barang atau jasa yang dijanjikan telah dialihkan kepada pelanggan.

Berdasarkan penilaian Perusahaan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara implementasi PSAK No. 72 dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebelumnya.

d. Penerapan awal PSAK No. 73, “Sewa”

Perusahaan menerapkan PSAK No. 73, “Sewa” secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali periode komparatif sebagaimana diizinkan oleh ketentuan transisi khusus dalam standar.

Untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, Perusahaan mengakui nilai tercatat aset sewa dan liabilitas sewa segera sebelum transisi sebagai nilai tercatat dari aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal penerapan awal.

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perusahaan mengakui liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai ‘sewa operasi’ berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, “Sewa”.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) BARU DAN REVISI, SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) (lanjutan)**d. Penerapan awal PSAK No. 73: “Sewa” (lanjutan)**

Dalam menerapkan PSAK No. 73 untuk pertama kalinya, Perusahaan menerapkan cara praktis berikut yang diperkenankan oleh standar:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- akuntansi sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;
- menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa alternatif kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
- untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar; dan
- mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi” segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

Perusahaan telah memilih untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak mengandung sewa atau tidak pada tanggal penerapan awal untuk kontrak yang telah ada sebelum tanggal transisi yang dimana Perusahaan telah menggunakan penilaian yang dibuat sesuai dengan PSAK No. 30, “Sewa” dan ISAK No. 8, “Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa”.

Lihat Catatan 23 untuk informasi lebih lanjut mengenai dampak penerapan PSAK No. 73 pada Perusahaan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**a. Pernyataan kepatuhan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (“Rp”), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
c. Penjabaran mata uang asing
i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp" atau "IDR"), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

	<u>2020*)</u>	<u>2019*)</u>
Dolar AS (USD)	14.105	13.901

*) dalam jumlah penuh

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". Kebijakan Perusahaan atas transaksi tersebut adalah dengan menggunakan persyaratan komersial normal.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Aset keuangan
Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020
i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**e. Aset keuangan (lanjutan)****Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)****i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)**

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Pengukuran

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Perusahaan mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**e. Aset keuangan (lanjutan)****iv. Pengukuran (lanjutan)**Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI): Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam (beban)/penghasilan lain-lain, bersih. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam (beban)/penghasilan lain-lain, bersih dan beban penurunan nilai pada (beban)/penghasilan lain-lain, bersih.
- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam (beban)/penghasilan lain-lain, bersih dalam periode kemunculannya.

Instrumen ekuitas

Perusahaan selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Perusahaan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam (beban)/penghasilan lain-lain, bersih dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**e. Aset keuangan (lanjutan)****iii. Pengukuran (lanjutan)****Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020****i. Pengakuan dan pengukuran awal**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

ii. Pengukuran selanjutnya aset keuangan

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh aset keuangan Perusahaan terdiri atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**e. Aset keuangan (lanjutan)****Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)****iii. Metode suku bunga efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

iv. Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**e. Aset keuangan (lanjutan)****Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)****v. Pengukuran nilai wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengukuran.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

f. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**g. Penurunan nilai aset keuangan****Kebijakan akuntansi sesudah 1 Januari 2020**

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menilai secara berwawasan ke depan kerugian kredit yang diharapkan terkait dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Saat membuat penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan, bukan perubahan jumlah kerugian kredit ekspektasian. Untuk membuat penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang wajar dan mendukung, yaitu tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya pada tanggal pelaporan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk semua aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontraktual.

Perusahaan menerapkan pendekatan individual dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan. Kerugian kredit ekspektasian dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian kredit ekspektasian disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (kerugian kredit ekspektasian 12 bulan).

Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu default (kerugian kredit ekspektasian seumur hidup).

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
h. Aset tetap

Perusahaan menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan perlakuan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perusahaan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, "Sewa". Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK No. 16, "Aset tetap" yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Tanah dicatat berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya awal untuk mendapatkan hak atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah. Penyusutan aset lain dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat yang diestimasi, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
<i>Docking</i> kapal	2,5
Kapal dan tongkang	10-25
Peralatan operasional	5
Kendaraan	5
Perlengkapan kantor	5

Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 3.i).

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Nilai kapal termasuk biaya *docking* dikapitalisasi pada saat terjadinya dan didepresiasi berdasarkan metode garis lurus sampai dengan *docking* berikutnya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**i. Penurunan nilai aset non-keuangan**

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya *goodwill*, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai.

Aset yang diamortisasi atau disusutkan diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan, selain *goodwill*, yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset, selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui langsung dalam laporan laba rugi. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

j. Kas dan bank

Kas dan bank termasuk kas dan kas di bank tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

k. Persediaan

Persediaan suku cadang dan bahan bakar dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

l. Sewa**Perusahaan sebagai pemberi sewa**

Ketika Perusahaan bertindak sebagai pemberi sewa, Perusahaan akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perusahaan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**I. Sewa (lanjutan)****Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020****Perusahaan sebagai penyewa**

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Perusahaan menyewa aset tetap tertentu, yang kontrak sewanya dibuat untuk periode tetap dari 2 hingga 14 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perusahaan. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Aset hak pakai didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa
- Pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu
- Harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- Pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Perusahaan, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**I. Sewa (lanjutan)****Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)****Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)**

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Perusahaan:

- Jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima
- Menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Perusahaan, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini, dan
- Membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Perusahaan dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak-guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima
- Biaya langsung awal, dan
- Biaya restorasi.

Aset hak-guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak-guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 3.i).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Perusahaan. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**l. Sewa (lanjutan)****Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)****Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)**Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Perusahaan terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Perusahaan bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai penyewa aset tetap tertentu. Sewa aset tetap dimana Perusahaan, sebagai *lessee*, memiliki sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini pembayaran sewa minimum.

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020**Perusahaan sebagai penyewa**

Kewajiban sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan beban keuangan sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa manfaat aset dan masa sewa apabila tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh *lessor* diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi insentif yang diterima dari *lessor*) dibebankan pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

m. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang lain-lain merupakan jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan tertagih dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika efek pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**n. Biaya dibayar dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa kemungkinan besar akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya dibayar dimuka untuk biaya keuangan dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

q. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Perusahaan memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

(i) Akuisisi

Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi dengan bagian Perusahaan atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**q. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)****(ii) Metode ekuitas**

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan atas laba rugi entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Perusahaan atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Perusahaan atas rugi entitas asosiasi dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Jika bagian Perusahaan atas rugi entitas asosiasi dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dalam entitas asosiasi tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Jika bukti tersebut ada, maka Perusahaan menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**q. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)****(ii) Pelepasan**

Investasi pada entitas asosiasi dihentikan pengakuannya apabila Perusahaan tidak lagi memiliki pengaruh signifikan dan investasi yang tersisa diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

r. Pengakuan pendapatan dan beban**Perlakuan akuntansi setelah 1 Januari 2020**

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 72 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

- i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
- v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)****Perlakuan akuntansi setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Pendapatan dari jasa penyewaan kapal dan keagenan diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut diberikan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan dari penyewaan kapal Perusahaan diakui proporsional selama periode perjanjian sewa kapal. Pendapatan dari jasa keagenan diakui pada saat jasa diserahkan. Beban diakui pada saat terjadinya.

s. Penghasilan bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari pendapatan lain.

Penghasilan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Ketika pinjaman atau piutang mengalami penurunan nilai, Perusahaan mengurangi nilai tercatat pinjaman dan piutang tersebut menjadi jumlah terpulihkannya, yakni estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan berdasarkan suku bunga efektif awal dari instrumen tersebut, dan terus mengamortisasi diskonto sebagai penghasilan keuangan. Penghasilan bunga atas pinjaman yang diberikan dan piutang yang mengalami penurunan nilai diakui menggunakan suku bunga efektif awal.

t. Imbalan kerjaImbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Perusahaan membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi

Perusahaan harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU Ketenagakerjaan") atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah program imbalan pasti.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**t. Imbalan kerja (lanjutan)**Imbalan pascakerja (lanjutan)

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui sepenuhnya melalui pendapatan komprehensif lain pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk didalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas dan pada neraca.

Penguran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar dimuka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada Perjanjian Kerja Bersama.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun terus menerus. Tunjangan kecelakaan dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris apabila karyawan meninggal dunia bukan karena kecelakaan dinas. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap delapan tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 16 tahun terus menerus.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**t. Imbalan kerja (lanjutan)**Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Perusahaan tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

u. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan kelompok kewajiban. Walaupun kemungkinan arus keluar sehubungan dengan setiap pos kewajiban tersebut kecil, dapat terdapat kemungkinan besar dibutuhkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

v. PerpajakanPajak penghasilan final

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagian besar pendapatan Perusahaan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dimana beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**v. Perpajakan**Pajak penghasilan di luar pajak final

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara dimana Perusahaan beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas asosiasi, dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan dimana saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Perusahaan dan sangat mungkin perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

w. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas.

Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen belum melakukan pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari yang melibatkan estimasi, yang diatur di bawah ini.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Perusahaan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap yang dimiliki Perusahaan ditentukan berdasarkan periode aset tersebut diharapkan masih dapat digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis.

Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN BANK

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kas	110	102
Bank	<u>109.077</u>	<u>186.700</u>
Jumlah	<u>109.187</u>	<u>186.802</u>

Lihat Catatan 20 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

6. PIUTANG USAHA**a. Berdasarkan pelanggan**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak berelasi (Catatan 20)	<u>720.524</u>	<u>560.788</u>
Pihak ketiga	67.129	13.443
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(12.892)</u>	<u>(12.892)</u>
Jumlah pihak ketiga - bersih	<u>54.237</u>	<u>551</u>
Jumlah piutang usaha - bersih	<u>774.761</u>	<u>561.339</u>

b. Berdasarkan umur

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Belum jatuh tempo	361.406	247.562
Lewat jatuh tempo		
1 s/d 90 hari	245.858	279.753
91 s/d 360 hari	107.378	29.761
Lebih dari 360 hari	<u>73.011</u>	<u>17.155</u>
	787.653	574.231
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(12.892)</u>	<u>(12.892)</u>
Jumlah piutang usaha - bersih	<u>774.761</u>	<u>561.339</u>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup, karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat dipulihkan. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak berelasi (Catatan 20)	48.879	41.774
Pihak ketiga		
PT Gresik Bandar Raya	8.503	8.503
Lainnya	752	2.663
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(8.503)</u>	<u>(8.503)</u>
Jumlah pihak ketiga - bersih	<u>752</u>	<u>2.663</u>
Jumlah piutang lain-lain - bersih	<u>49.631</u>	<u>44.437</u>

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Perusahaan menyewakan kapal milik PT Jaya Samudra Karunia Shipping ("JSK") kepada PLN Unit Tanjung Jati B ("PLN TJB") melalui mekanisme subsewa. Mengacu kepada kontrak sewa dengan JSK, masa sewa akan berakhir pada 31 Desember 2025.

Analisis jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa pembiayaan neto adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>
Piutang sewa bruto:	
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	79.516
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	<u>357.158</u>
	436.674
Dikurangi: pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	<u>(214.091)</u>
Piutang sewa neto	222.583
Bagian lancar	<u>14.132</u>
Bagian tidak lancar	<u>208.451</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP

	2020			
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Tanah	2.966	-	-	2.966
Bangunan	6.193	-	-	6.193
Kapal dan tongkang	1.400.441	207.221	-	1.607.662
Peralatan operasional	84	-	-	84
Kendaraan	1.415	-	-	1.415
Perlengkapan kantor	4.015	248	-	4.263
Sub jumlah	1.415.114	207.469	-	1.622.583
Pekerjaan dalam pelaksanaan	-	15.075	-	15.075
Jumlah	1.415.114	222.544	-	1.637.658
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	2.718	242	-	2.960
Kapal dan tongkang	555.533	117.757	-	673.290
Peralatan operasional	84	-	-	84
Kendaraan	1.415	-	-	1.415
Perlengkapan kantor	3.904	137	-	4.041
Jumlah	563.654	118.136	-	681.790
Jumlah tercatat	851.460			955.868

	2019			
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Tanah	2.966	-	-	2.966
Bangunan	4.645	1.182	366	6.193
Kapal dan tongkang	1.230.283	170.158	-	1.400.441
Peralatan operasional	84	-	-	84
Kendaraan	1.415	-	-	1.415
Perlengkapan kantor	3.869	146	-	4.015
Sub jumlah	1.243.262	171.486	366	1.415.114
Pekerjaan dalam pelaksanaan	366	-	(366)	-
Jumlah	1.243.628	171.486	-	1.415.114
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	2.563	155	-	2.718
Kapal dan tongkang	457.954	97.579	-	555.533
Peralatan operasional	84	-	-	84
Kendaraan	1.415	-	-	1.415
Perlengkapan kantor	3.468	436	-	3.904
Jumlah	465.484	98.170	-	563.654
Jumlah tercatat	778.144			851.460

Beban penyusutan dialokasikan sebagai beban (Catatan 18) pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp118.136 dan Rp98.170.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Entitas	Domisili	Jenis usaha	Tahun operasi komersial	Persentase penyertaan	
				2020	2019
Entitas asosiasi					
PT PBM Adhiguna Putera ("PBM AP")	Jakarta	Pelayaran	1987	24,98%	24,98%

Merupakan penyertaan atas kepemilikan PBM AP, yang bergerak di bidang pengusahaan kegiatan pelabuhan dan berdomisili di Jakarta. PBM AP mulai melakukan operasi komersil pada tahun 1987.

PBM AP merupakan perusahaan tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham entitas asosiasi tersebut.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2020	Dividen	Bagian atas laba bersih	Bagian atas beban komprehensif lainnya	31 Desember 2020
<u>Entitas asosiasi</u>					
PBM AP	37.164	(4.055)	8.137	(75)	41.171
Jumlah	37.164	(4.055)	8.137	(75)	41.171
	1 Januari 2019	Dividen	Bagian atas laba bersih	Bagian atas beban komprehensif lainnya	31 Desember 2019
<u>Entitas asosiasi</u>					
PBM AP	30.948	(2.749)	9.053	(88)	37.164
Jumlah	30.948	(2.749)	9.053	(88)	37.164

Ringkasan informasi keuangan PBM AP, entitas asosiasi yang tercatat menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<u>Lancar</u>		
Kas dan setara kas	41.949	20.307
Aset lancar lainnya	291.224	308.584
Jumlah aset lancar	333.173	328.891
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha	(58.169)	(83.407)
Liabilitas lancar lainnya	(86.790)	(91.292)
Jumlah liabilitas lancar	(144.959)	(174.699)
<u>Tidak lancar</u>		
Aset tidak lancar	27.749	9.091
Liabilitas tidak lancar	(51.146)	(14.509)
Aset bersih	164.817	148.774
% kepemilikan efektif	24,98	24,98
Bagian Perusahaan atas aset bersih Perusahaan asosiasi	41.171	37.164
Jumlah tercatat	41.171	37.164

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

	2020	2019
Pendapatan	477.492	495.302
Harga pokok penjualan	(356.932)	(384.018)
Beban umum dan administrasi	(77.726)	(61.552)
Pendapatan lain-lain	<u>4.124</u>	<u>736</u>
Laba usaha	46.958	50.468
Beban pajak penghasilan	<u>(14.385)</u>	<u>(14.228)</u>
Laba tahun berjalan	32.573	36.240
Rugi komprehensif lainnya	<u>(299)</u>	<u>(351)</u>
Jumlah laba komprehensif	<u><u>32.274</u></u>	<u><u>35.889</u></u>
Dividen yang terhutang ke Perusahaan oleh entitas asosiasi	<u><u>4.055</u></u>	<u><u>2.749</u></u>

11. UTANG USAHA

	2020	2019
Pihak berelasi (Catatan 20)	<u>26.939</u>	<u>8.244</u>
Pihak ketiga		
PT Lumoso Pratama Line	74.310	19.157
PT Arghaniaga Pancatunggal	52.518	19.359
PT Dharmalancar Sejahtera	50.757	45.760
PT Pelayaran Mana Lagi	40.318	8.867
PT Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	33.514	-
PT Andhika Lines	27.929	8.589
PT Trans Power Marine Tbk	27.058	3.600
Lain-lain	<u>231.124</u>	<u>280.151</u>
Jumlah pihak ketiga	<u>537.528</u>	<u>385.483</u>
Jumlah	<u>564.467</u>	<u>393.727</u>

12. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2020	2019
Pihak berelasi (Catatan 20)		
Bunga pinjaman jangka panjang	4.708	5.411
Keagenan dan administrasi	<u>3.447</u>	<u>-</u>
Jumlah pihak berelasi	<u>8.155</u>	<u>5.411</u>
Pihak ketiga		
Administrasi kapal	23.453	-
Bonus dan insentif kerja	13.643	6.258
Lain-lain	<u>217</u>	<u>6.034</u>
Jumlah pihak ketiga	<u>37.313</u>	<u>12.292</u>
Jumlah	<u>45.468</u>	<u>17.703</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PINJAMAN JANGKA PANJANG

	<u>2020</u>	<u>2019*)</u>
Jumlah pokok pinjaman (Catatan 20)	553.226	691.851
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(142.656)</u>	<u>(138.625)</u>
Bagian jangka panjang	<u>410.570</u>	<u>553.226</u>

Akun ini merupakan pinjaman pemegang saham ("SHL") yang diberikan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

2020						
	<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Jumlah penarikan</u>	<u>Bagian jatuh tempo dalam satu tahun</u>	<u>Bagian jangka panjang</u>	<u>Tingkat bunga efektif per tahun</u>	<u>Periode</u>
SHL 1	28 September 2011	287.091	28.709	7.177	12,24%	2012-2022
SHL 2	8 Juni 2012	555.888	58.698	88.048	9,88%	2012-2023
SHL 3	21 November 2014	261.438	26.144	84.967	11,52%	2014-2025
SHL 4	20 Mei 2019	129.807	12.981	97.355	9,84%	2019-2029
SHL 5	10 Desember 2019	<u>129.807</u>	<u>16.124</u>	<u>133.023</u>	8,63%	2019-2029
Total			<u>142.656</u>	<u>410.570</u>		

2019*)						
	<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Jumlah penarikan</u>	<u>Bagian jatuh tempo dalam satu tahun</u>	<u>Bagian jangka panjang</u>	<u>Tingkat bunga efektif per tahun</u>	<u>Periode</u>
SHL 1	28 September 2011	287.091	28.709	35.886	12,24%	2012-2022
SHL 2	8 Juni 2012	555.888	58.698	146.746	9,88%	2012-2023
SHL 3	21 November 2014	261.438	26.144	111.111	11,52%	2014-2025
SHL 4	20 Mei 2019	129.807	12.981	110.336	9,84%	2019-2029
SHL 5	10 Desember 2019	<u>161.240</u>	<u>12.093</u>	<u>149.147</u>	8,63%	2019-2029
Total			<u>138.625</u>	<u>553.226</u>		

Beban bunga pinjaman SHL tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp62.498 dan Rp50.648 (Catatan 20).

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 24

14. LIABILITAS SEWA

Pembayaran minimum atas kewajiban sewa pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan jatuh tempo

	<u>2020</u>
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:	
Tidak lebih dari satu tahun	103.740
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	76.795
Lebih dari lima tahun	<u>76.591</u>
Jumlah pembayaran minimum kewajiban sewa	257.126
Dikurangi diskonto	<u>(44.999)</u>
Nilai kini pembayaran minimum	212.127
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(82.797)</u>
Bagian jangka panjang	<u>129.330</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. LIABILITAS SEWA (lanjutan)**Berdasarkan pemberi sewa**

	<u>2020</u>
Nilai kini pembayaran minimum sewa	
Pihak ketiga	
PT Jaya Samudra Karunia Shipping	211.309
Lain-lain	<u>818</u>
Jumlah	<u>212.127</u>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(82.797)</u>
Bagian jangka panjang	<u>129.330</u>

15. MODAL SAHAM

	<u>2020 dan 2019</u>		
<u>Pemegang saham</u>	<u>Jumlah saham*)</u>	<u>Persentase kepemilikan</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
PT PLN (Persero)	21.674	100,00%	21.674
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	<u>1</u>	<u>0,00%</u>	<u>1</u>
Jumlah	<u>21.675</u>	<u>100,00%</u>	<u>21.675</u>

*) Dalam jumlah penuh

Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp86.696 yang terdiri atas 86.696 lembar saham dengan nilai nominal Rp1 per saham. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp21.675 yang terdiri atas 21.675 lembar saham.

16. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Desember 2008, melalui perjanjian No.A.2420/SP.904/DIRUT/2008, PT PLN (Persero) memberikan fasilitas dana talangan (*bridging finance*) kepada Perusahaan dengan jumlah maksimum sebesar Rp30.900 untuk keperluan restrukturisasi Sumber Daya Manusia ("SDM") dan *docking* KM Adhiguna Tarahan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengambilalihan/akuisisi seluruh saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan oleh PT PLN (Persero). Terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sampai dengan tanggal selesai dilakukannya proses akuisisi oleh PT PLN (Persero), maka dana talangan yang telah diterima oleh Perusahaan baik sebagian maupun seluruhnya tidak wajib dikembalikan kepada PT PLN (Persero) selama proses akuisisi.

Berdasarkan adendum perjanjian kedua No.A.388/SP.904/DIRUT-2009 tertanggal 22 Oktober 2009, PT PLN (Persero) menyetujui tambahan dana talangan sebesar Rp12.400 menjadi Rp43.300.

Perjanjian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui adendum No.A.1067/SP.904/Dirut-2012 tanggal 16 Mei 2012 yang menyatakan antara lain bahwa proses akuisisi Perusahaan oleh PT PLN (Persero) telah selesai dan untuk dana talangan yang telah digunakan oleh Perusahaan sebesar Rp33.406 dikonversikan menjadi tambahan penyertaan modal disetor PT PLN (Persero) ke Perusahaan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PENDAPATAN USAHA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak berelasi (Catatan 20)		
Sewa kapal	1.893.462	1.627.470
Jasa manajemen	260	-
Jumlah pihak berelasi	<u>1.893.722</u>	<u>1.627.470</u>
Pihak ketiga		
Sewa kapal	72.477	-
Jasa manajemen	231	334
Jumlah pihak ketiga	<u>72.708</u>	<u>334</u>
Jumlah	<u>1.966.430</u>	<u>1.627.804</u>

18. BEBAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sewa kapal	1.157.572	1.009.523
Bahan bakar dan pelumas	164.537	130.658
Penyusutan aset tetap dan aset hak-guna	118.678	98.170
Bongkar muat	81.263	52.565
Jasa manajemen perkapalan pihak ketiga	34.816	28.805
Beban pajak final	23.570	19.530
Pegawai kontrak kerja dan harian	18.860	10.847
Gaji dan kesejahteraan karyawan	16.711	13.768
Lain-lain	132.207	94.316
Jumlah	<u>1.748.214</u>	<u>1.458.182</u>

Beban tersebut di atas disajikan sebagai berikut dalam laporan laba rugi:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban pokok pendapatan	1.703.806	1.418.402
Beban umum dan administrasi	44.408	39.780
Jumlah	<u>1.748.214</u>	<u>1.458.182</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN**a. Pajak dibayar dimuka**

	<u>2020</u>	<u>2019*)</u>
Pajak penghasilan ("PPh") Pasal 15	6.176	-
Pembayaran dimuka atas		
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	<u>35.814</u>	<u>35.035</u>
Jumlah	<u>41.990</u>	<u>35.035</u>
Dikurangi: bagian lancar	<u>(6.176)</u>	<u>-</u>
Bagian tidak lancar	<u>35.814</u>	<u>35.035</u>

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 24

b. Utang pajak

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PPh:		
- Pasal 15	8.703	3.693
- Badan	870	159
Pajak lainnya:		
- PPN	17.499	16.925
- Lain-lain	<u>1.625</u>	<u>1.627</u>
Jumlah	<u>28.697</u>	<u>22.404</u>

c. Beban pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>197.401</u>	<u>128.095</u>
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan		
final - setelah dikurangi beban terkait	(194.173)	(118.648)
Beban/(pendapatan) lain yang tidak dapat dikurangkan/		
(perhitungkan) menurut pajak	<u>5.724</u>	<u>(6.088)</u>
Penghasilan kena pajak	<u>8.952</u>	<u>3.359</u>
Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah		
sebagai berikut:		
Beban pajak kini	1.969	840
Dikurangi pembayaran pajak dimuka:		
- PPh pasal 23	(479)	(8)
- PPh pasal 25	<u>(620)</u>	<u>(673)</u>
Kurang bayar pajak penghasilan Perusahaan	<u>870</u>	<u>159</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)**c. Beban pajak penghasilan** (lanjutan)

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut dapat disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke Kantor Pajak.

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak penghasilan dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	197.401	128.095
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku 22% (2019: 25%)	<u>43.428</u>	<u>32.024</u>
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final - setelah dikurangi beban terkait	(42.718)	(29.662)
Beban/(pendapatan) lain yang tidak dapat dikurangkan/ (perhitungkan) menurut pajak	<u>1.259</u>	<u>(1.522)</u>
Jumlah beban pajak penghasilan	<u>1.969</u>	<u>840</u>

d. Ketetapan pajak

Jenis pajak	Tahun pajak	Surat pajak	Tanggal surat	Jumlah yang diperkarakan	Status
PPN dan PPh badan	2014	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Tagihan Pajak	April 2019	5.040	Banding
PPN, PPh badan dan lain-lain	2017	SKPKB	Februari – Desember 2019	<u>32.702</u>	Peninjauan kembali
Jumlah				<u>37.742</u>	

Manajemen telah melakukan analisis terhadap posisi perpajakannya dan berkeyakinan bahwa hasil akhir dari pemeriksaan pajak di atas tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas Perusahaan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)**e. Tarif pajak**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19") dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 antara lain menetapkan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020-2021 dan sebesar 20% yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2022.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung dan menyetorkan besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

20. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**Sifat Hubungan Berelasi**

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Sifat transaksi
PT PLN (Persero)	Entitas Induk atau pemegang saham	Pemberi modal dan transaksi penjualan jasa
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	Entitas Induk atau pemegang saham	Pemberi modal
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan rekening bank dan setara kas
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan rekening bank dan setara kas
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan rekening bank
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas Induk atau pemegang saham	Transaksi Penjualan Jasa
PT PLN Batubara	Entitas sepengendali	Transaksi penjualan jasa
PT Sumber Segara Primadaya	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Transaksi penjualan jasa
PT Bukit Asam Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Transaksi penjualan jasa
PT Indonesia Power	Entitas sepengendali	Transaksi penjualan jasa
PT PLN TJB	Entitas sepengendali	Transaksi penjualan jasa
PT Banyan Koalindo Lestari	Entitas sepengendali	Transaksi penjualan jasa
PBM AP	Entitas yang dipengaruhi atau entitas asosiasi	Transaksi penjualan jasa
PT Haleyora Powerindo	Entitas sepengendali	Transaksi pembelian jasa
PT Indonesia Comnets Plus	Entitas sepengendali	Transaksi pembelian jasa

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

	Catatan	2020		2019	
		Rp	%	Rp	%
Kas dan bank	5				
Bank Negara Indonesia		62.611	2,64%	8.401	0,48%
Bank Mandiri		42.907	1,81%	170.208	9,67%
Bank Rakyat Indonesia		1.299	0,05%	43	0,00%
Subjumlah		106.817	4,50%	178.652	10,15%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)**

	Catatan	2020		2019	
		Rp	%	Rp	%
Piutang usaha	6				
PT PLN Batubara		350.181	14,75%	125.197	7,11%
PT PLN (Persero)		147.107	6,19%	206.781	11,74%
PT Indonesia Power		124.482	5,24%	99.953	5,68%
PLN TJB		35.048	1,48%	29.971	1,71%
PT Banyan Koalindo Lestari		32.528	1,37%	71.565	4,06%
PT Sumber Segara Primadaya		20.690	0,87%	24.506	1,39%
PBM AP		10.488	0,44%	1.258	0,07%
PT Bukit Asam Tbk		-	0,00%	1.557	0,09%
Subjumlah		720.524	30,34%	560.788	31,85%
Piutang lain-lain	7				
PBM AP		43.467	1,83%	35.715	2,03%
PLN TJB		5.412	0,23%	6.059	0,34%
Subjumlah		48.879	2,06%	41.774	2,37%
Piutang sewa pembiayaan	8				
PLN TJB		222.583	9,37%	-	-
Jumlah		1.098.803	46,27%	779.956	44,29%
Utang usaha	11				
PBM AP		26.939	1,90%	8.244	0,72%
Utang lain-lain					
PT PLN (Persero)		4.977	0,35%	5.525	0,48%
PT Indonesia Power		3.894	0,28%	1.109	0,10%
PT Haleyora Powerindo		626	0,04%	-	0,00%
PT Indonesia Comments Plus		379	0,03%	639	0,06%
Subjumlah		9.876	0,70%	7.273	0,64%
Biaya yang masih harus dibayar	12				
PT PLN (Persero)		4.708	0,33%	5.411	0,47%
PBM AP		3.447	0,24%	-	0,00%
Subjumlah		8.155	0,57%	5.411	0,47%
Pinjaman jangka panjang	13				
PT PLN (Persero)		553.226	38,97%	691.851	60,64%
Jumlah		598.196	42,14%	702.787	61,60%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)**

	Catatan	2020		2019	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Usaha	17				
PT PLN (Persero)		806.200	41,00%	845.910	51,97%
PT PLN Batubara		662.736	33,70%	415.834	25,55%
PT Indonesia Power		315.606	16,05%	343.660	21,11%
PT Sumber Segara Primadaya		73.188	3,72%	22.066	1,36%
PT Banyan Koalindo Lestari		27.833	1,42%	-	0,00%
PBM AP		8.159	0,41%	-	0,00%
Jumlah		<u>1.893.722</u>	<u>96,30%</u>	<u>1.627.470</u>	<u>99,98%</u>
Beban pokok pendapatan	18				
PBM AP		92.458	5,43%	52.582	3,71%
PT Indonesia Power		7.364	0,43%	4.653	0,33%
Jumlah		<u>99.822</u>	<u>5,86%</u>	<u>57.235</u>	<u>4,04%</u>
Beban umum dan administrasi	18				
PT Halezora Powerindo		2.499	5,63%	22	0,06%
PT Indonesia Comnets Plus		1.246	2,81%	603	1,52%
Jumlah		<u>3.745</u>	<u>8,43%</u>	<u>625</u>	<u>1,58%</u>
Beban Bunga					
PT PLN (Persero)		62.498	76,73%	50.648	100%
Penghasilan Bunga					
PLN TJB		61.618	100%	-	-

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban pokok pendapatan/beban umum dan administrasi/beban bunga/penghasilan bunga

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.578 dan Rp5.828. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

21. PERJANJIAN PENTING**a. Kontrak jasa transportasi**

Perusahaan mempunyai beberapa perjanjian jasa transportasi laut pengangkutan batubara yang signifikan dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi. Jangka waktu perjanjian bervariasi dan berakhir sampai dengan 2031.

b. Kontrak jasa pengadaan pasokan bahan bakar kapal

Perusahaan mempunyai beberapa perjanjian jasa pengadaan pasokan bahan bakar kapal yang signifikan dengan pihak ketiga. Jangka waktu kontrak bervariasi dan berakhir sampai dengan 2021.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mengklasifikasikan kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, rekening bank yang dibatasi penggunaannya dan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp1.157.573 (2019: Rp792.578) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa sebesar Rp1.373.393 (2019: Rp1.107.106) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

	2020	
	Dampak terhadap laba setelah pajak	
	US\$	
	+10%	-10%
Aset Keuangan		
Kas dan bank	585	(585)
Jumlah aset keuangan	585	(585)
	2019	
	Dampak terhadap laba setelah pajak	
	US\$	
	+10%	-10%
Aset Keuangan		
Kas dan bank	16.228	(16.228)
Jumlah aset keuangan	16.228	(16.228)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)****ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga**

Per tanggal 31 Desember 2020, manajemen percaya risiko tingkat suku bunga adalah minimal dikarenakan Perusahaan hanya terekspos risiko tingkat suku bunga melalui saldo kas di bank dan pinjaman dari pemegang saham.

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") dengan semua variabel lainnya dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat suku bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika suku bunga mengalami kenaikan 50 basis poin dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah Rp3.456. Sebaliknya jika suku bunga mengalami penurunan 50 basis poin, dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak akan lebih tinggi Rp3.456.

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan timbul terutama atas piutang usaha dari pelanggan. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan bank, Perusahaan mengelola rekening pada beberapa bank dengan reputasi baik dengan tujuan meminimalkan risiko kredit dan untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi. Perusahaan menempatkan dana pada beberapa Bank yang kredibel (Catatan 5).

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian kredit ekspektasian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit. Pada tanggal 31 Desember 2020, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp1.157.463 (2019: Rp792.476) yang terutama berasal dari kas di bank, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang sewa pembiayaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)****iii. Manajemen risiko kredit**

Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi karena meningkatnya eksposur risiko kredit.

Pelanggan Perusahaan adalah PLN grup. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena risiko kegagalan kredit PLN rendah dimana Perusahaan telah secara legal terikat dalam perjanjian dengan PLN grup untuk sewa kapal dan tongkang.

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Kualitas kredit aset keuangan Perusahaan dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat internal.

Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan Sistem Peringkat Perusahaan. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit dan Sistem Peringkat Perusahaan dinilai sebagai berikut:

(a) Tingkat tinggi

Aset keuangan tingkat tinggi meliputi kas dan bank kepada pihak ketiga atau bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh sebab itu, risiko kredit adalah minimal. Untuk piutang usaha, pelanggan maupun pihak berelasi dapat diberi peringkat tingkat tinggi jika tidak memiliki kesulitan keuangan, tidak terjadi pelanggaran kontrak, tidak ada pemberian keringanan dan memiliki kelangsungan usaha.

(b) Tingkat rendah

Aset keuangan peringkat rendah termasuk piutang usaha yang tidak diklasifikasikan sebagai tingkat tinggi. Untuk piutang usaha, pelanggan dapat diberi peringkat rendah jika pelanggan memiliki kesulitan keuangan, melakukan pelanggaran kontrak, menerima pemberian keringanan, dan tidak memiliki kelangsungan usaha.

Per 31 Desember 2020, kualitas kredit semua aset keuangan Perusahaan berada dalam klasifikasi tingkat tinggi.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan simpanan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)****iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)**

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan diwajibkan untuk membayar. Tanggal jatuh tempo kontraktual berdasarkan pada tanggal paling awal dimana Perusahaan diwajibkan untuk membayar.

	2020			
	Dalam satu tahun	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun	Lebih dari lima tahun
				Jumlah
Utang usaha	564.467	-	-	-
Liabilitas sewa	103.740	76.795	76.591	-
Utang lain-lain	11.748	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	31.825	-	-	-
Pinjaman jangka panjang	191.384	336.441	122.294	61.270
Jumlah	903.164	413.236	198.885	61.270
				1.576.555
	2019			
	Dalam satu tahun	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun	Lebih dari lima tahun
				Jumlah
Utang usaha	393.727	-	-	-
Utang lain-lain	10.083	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	11.445	-	-	-
Pinjaman jangka panjang	202.659	455.147	159.144	97.099
Jumlah	617.914	455.147	159.144	97.099
				1.329.304

c. Manajemen modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**d. Estimasi nilai wajar**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya sebagai berikut:

1. Kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
2. Utang usaha, utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
3. Nilai wajar piutang sewa pembiayaan menggunakan arus kas yang didiskontokan berdasarkan tingkat suku bunga terakhir dari piutang sewa pembiayaan. Pengungkapan nilai wajar piutang sewa pembiayaan dihitung dengan menggunakan input Level 3.
4. Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga tetap, nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut berkisar menunjukkan nilai wajarnya berdasarkan tingkat bunga pasar pada saat tanggal pengakuan awal.

23. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK NO. 73

Dampak terhadap laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019 sebelumnya	PSAK No. 73	1 Januari 2020
Aset lancar			
Piutang sewa pembiayaan	-	17.897	17.897
Aset tidak lancar			
Aset hak-guna	-	1.270	1.270
Piutang sewa pembiayaan	-	232.357	232.357
JUMLAH ASET	-	251.524	251.524
Liabilitas jangka pendek			
Liabilitas sewa	-	68.634	68.634
Liabilitas jangka panjang			
Liabilitas sewa	-	182.890	182.890
JUMLAH LIABILITAS	-	251.524	251.524

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK NO. 73 (lanjutan)

Berikut ini informasi lebih lanjut mengenai dampak penerapan PSAK No. 73, Sewa pada Perusahaan.

(i) Pengukuran kembali sewa

	<u>2020</u>
Komitmen sewa operasi pada 31 Desember 2019	308.461
Didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman tambahan <i>lessee</i> pada tanggal penerapan awal	251.647
Dikurangi: sewa jangka pendek tidak diakui sebagai liabilitas	<u>(123)</u>
Liabilitas sewa diakui pada tanggal 1 Januari 2020	<u>251.524</u>

Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 8,63% per tahun

(ii) Pengukuran aset hak-guna

Aset hak-guna diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa yang dibayar dimuka atau yang masih harus dibayar terkait sewa tersebut yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

24. REKLASIFIKASI

Laporan keuangan 2019 telah direklasifikasi agar konsisten dengan presentasi laporan keuangan 2020. Rincian akun-akun yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:

	<u>Sebelum reklasifikasi</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Setelah reklasifikasi</u>
Laporan posisi keuangan			
<u>Aset</u>			
Aset lancar			
Pajak dibayar dimuka	35.035	(35.035)	-
Aset tidak lancar			
Pajak dibayar dimuka	-	35.035	35.035
<u>Liabilitas</u>			
Liabilitas jangka pendek			
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	126.532	12.093	138.625
Liabilitas jangka panjang			
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	565.319	(12.093)	553.226

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. REKLASIFIKASI (lanjutan)

Reklasifikasi di atas tidak memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan tahun sebelumnya atau laporan posisi keuangan awal tahun sebelumnya sehingga manajemen berpendapat bahwa penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2019 tidak diperlukan.

25. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>Penerapan awal PSAK No. 73</u>	<u>Pembayaran</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas jangka panjang				
Pinjaman jangka panjang kepada pemegang saham	691.851	-	(138.625)	553.226
Liabilitas sewa	-	251.524	(39.397)	212.127
	<u>31 Desember 2018</u>	<u>Perolehan</u>	<u>Pembayaran</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Liabilitas jangka panjang				
Pinjaman jangka panjang kepada pemegang saham	520.846	290.047	(119.042)	691.851

26. INFORMASI LAINNYA

Sejak awal tahun 2020, telah terjadi wabah penyakit COVID-19 di seluruh dunia, yang dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") sebagai pandemi. Pandemi sangat mempengaruhi, antara lain, permintaan global untuk produk dan jasa dan rantai pasokan.

Di saat yang sulit ini, Perusahaan terus berupaya mempertahankan kegiatan operasional dan terus berfokus untuk tetap efisien serta melindungi kesehatan dan keselamatan para karyawan. Tim kesehatan, keselamatan dan lingkungan ("K3LH") di lapangan dan di Surabaya telah menerapkan langkah-langkah pencegahan maupun prosedur kesehatan yang harus dipatuhi setiap karyawan, termasuk peningkatan perilaku higienis, larangan perjalanan non esensial, penerapan jarak fisik di tempat kerja, identifikasi kelompok risiko tinggi di Perusahaan, dan sedapat mungkin bekerja dari rumah untuk para karyawan yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Setiap unit bisnis telah menyiapkan rencana manajemen krisis dan menyiapkan tindakan pencegahan yang diperlukan.

Prioritas pertama Perusahaan adalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan pemasok kami. Beberapa kegiatan utama yang telah kami lakukan pada masa pandemi ini, meliputi antara lain:

- Menjalankan program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna memastikan kesehatan karyawan kami.
- Memberikan arahan dan dukungan kepada karyawan.
- Memantau dengan cermat kapasitas infrastruktur dan keamanan kegiatan operasional kami.
- Mengikuti arahan dari Pemerintah dan organisasi kesehatan.
- Senantiasa melayani dan melibatkan pelanggan dan pemasok.
- Mengembangkan rencana kami sebagaimana diperlukan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. INFORMASI LAINNYA (lainnya)

Perusahaan telah melakukan penilaian atas dampak kejadian ini terhadap rencana operasi dan bisnis Perusahaan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan di atas, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Perusahaan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Manajemen akan terus memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi Perusahaan.

27. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab Manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2021.